

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMK NEGERI 2 MALANG

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gerlar S-2
Program Studi Magister Kebijakan Pengembangan Pendidikan**



Di susun Oleh :

Desy Rismayanti

NIM: 201710240211007

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Maret 2019

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMK NEGERI 2 MALANG

Yang diajukan oleh :


Desy Rismayanti

NIM. 201710240211007

Telah disetujui

Tanggal 28 Maret 2019

Pembimbing Utama



Dr. Endang Poerwanti, M.Pd

Pembimbing Pendamping



Dr. Moh Mahfud Efendi, MM

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **DESY RISMAYANTI**

NIM : **201710240211007**

Program Studi : **Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMK NEGERI 2 MALANG** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 April 2019
Yang menyatakan,




DESY RISMAYANTI

Implementasi Pendidikan Inklusif Di SMK Negeri 2 Malang

DESY RISMAYANTI
201710240211007

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Kamis/ 28 Maret 2019**

Pembimbing Utama



Dr. Endang Poerwanti

Direktur
Program Pascasarjana



Akhsanul In'am, Ph.D

Pembimbing Pendamping



Dr. Moh. Mahfud Effendi

Ketua Program Studi
Magister Kebijakan dan
Pengembangan Pendidikan



Dr. Agus Tinus

TESIS

DESY RISMAYANTI
201710240211007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Kamis/ 28 Maret 2019
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua / Penguji : Dr. Endang Poerwanti, M.Pd
Sekretaris / Penguji : Dr. Moh. Mahfud Effendi, MM
Penguji I : Akhsanul In'am, Ph.D
Penguji II : Dr. Agus Tinus, M.Pd

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan),
tetaplah berkerja keras (untuk urusan yang lain)”

Dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur Saya persembahkan karya ini untuk orang-orang terdekat dan yang selalu mensupport saya:

Allah SWT yang selalu memberi saya kesehatan dan kelancaran; Almarhumah Ibunda tercinta saya Yuliati, terima kasih untuk setiap tetes kasih sayang yang tiada henti tcurahkan dan semoga beliau bahagia akan kesuksesan putrinya; Untuk Ayahanda tercinta Sutikno yang telah memberikan kesempatan saya untuk bersekolah lebih tinggi lagi sampai kejenjang magister, sehat selalu ayahanda semoga saya bisa membalas semua pengorbananmu dengan kebahagiaan serta senyuman kecilmu; Kedua kakak saya Yunita dan Pramita, terima kasih atas dukungan serta semangat yang telah engkau berikan kepada adikmu ini; Orang terkasih saya yang selalu mengusap air mata saya ketika saya sedang menemui kesulitan dalam usaha saya, Deni Sandi selalu bersama untuk meraih kesuksesan kita, aamiin _ _ _ _ _

Tidak lupa kata terima kasih yang banyak untuk teman-teman seperjuangan S2 di kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Malang, yakinlah bahwa kita mampu kawan-kawanku. Selalu semangat untuk tujuan masing-masing, selalu diberikan kesehatan dan tidak lupa rasa syukur yang banyak untuk kita semua. Serta teman-teman kos saya yang biasanya menemani saya begadang untuk menyusun TESIS saya dimana tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

_ _ Almaterku tercinta UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MALANG _ _

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **Implementasi Pendidikan Inklusif Di SMK Negeri 2 Malang**. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita Sang pelopor Ilmu Pengetahuan untuk membaca tanda-tanda kekuasaan-Nya, Nabi Muhammad SAW.

Selama proses penyusunan hingga selesainya Tesis ini penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, pengarahan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Akhsanul In'am, Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Bapak Dr. Agus Tinus, M.Pd selaku Ketua Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan;
3. Ibu Dr. Endang Poerwanti, M.Pd selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Moh. Mahfud Effendi, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyusun Tesis ini;
4. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat serta memberikan pengetahuannya selama kuliah untuk memperluas wawasan saya;
5. Kedua Orang Tua saya yang selalu mendukung dan tidak lupa selalu mendoakan kesuksesan untuk saya;
6. Kedua kakak kandung saya dimana juga selalu menyemangati pada saat saya menempuh kuliah di Pascasarjana ini;
7. Orang terkasih saya yang selalu mensupport saya dan selalu mendoakan keberhasilan saya;
8. Teman seperjuangan di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, sukses selalu untuk kita semua;
9. Teman-teman kos yang memberi semangat dan menemani saya pada saat menyusun Tesis; dan
10. Semua orang sekeliling saya yang selalu mendukung serta mendoakan saya agar cepat wisuda dan menikah.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang selalu mendukung saya. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu diharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.....

Malang, 28 Maret 2019

Penulis,



Desy Rismayanti

Rismayanti, Desy. 2019. *Implementasi Pendidikan Inklusif Di SMK Negeri 2 Malang*. Tesis, Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1) Dr. Endang Poerwanti, M.Pd., (2) Dr. Moh. Mahfud Efeendi, MM.

Abstrak: Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang didasari semangat terbuka untuk merangkul semua kalangan dalam pendidikan. Keberhasilan program pendidikan inklusif membutuhkan instrument input yang memadai, salah satunya yaitu peran profesional dari guru pembimbing khusus (GPK). Tujuan penelitian ini yaitu untuk a) melihat implementasi pendidikan inklusif berjalan yang meliputi penerimaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi bagi peserta didik; b) mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat implementasi sekolah inklusif; serta c) mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari implementasi sekolah inklusif di SMK Negeri 2 Malang. Jenis penelitian ini penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kebijakan, dimana studi mendalam dengan menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelaksanaan implementasi sudah baik dalam hal penerimaan, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi di SMK Negeri 2 Malang, yang diikuti oleh peserta didik berkebutuhan khusus dengan ketunaan autisme, tuna grahita, ADHD, slow learner, tuna rungu, serta ketunaan ganda (lebih ketunaannya). Faktor pendukung internal dan eksternal adanya kolaborasi dari berbagai pelaku pendidikan inklusif, pemerintah, orang tua wali murid, masyarakat sekitar sekolah, serta para guru pendamping khusus. Faktor penghambat internal dan eksternal, minimnya bantuan sarana prasarana dari pemerintah. Dampak positif dari implementasi pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang adanya dukungan dari semua pihak pelaku pendidikan inklusif, untuk dampak negatif penelitian ini dalam faktor penghambat yaitu minimnya bantuan sarana prasarana dari pemerintah. Saran peneliti, sebaiknya sekolah selalu mengirim surat untuk pemerintah dalam hal bantuan sarana prasarana agar pemerintah bisa cepat tanggap dalam membantu dalam hal ini. Bisa juga mencari sponsor melalui CSR (Corporate Social Responsibility), swadana dari orang tua wali murid, dan penggalangan dari dana masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus

Rismayanti, Desy. 2019. *Implementation of Inclusive Education at SMK Negeri 2 Malang*. Thesis, Master of Education Policy and Development, University of Muhammadiyah Malang. Supervised by: (1) Dr. Endang Poerwanti, M.Pd., (2) Dr. Moh. Mahfud Efeendi, MM.

Abstract: Inclusive education is education based on an open spirit to embrace all circles in education. The success of inclusive education programs requires adequate input instruments, one of which is the professional role of a special guidance teacher (GPK). The purpose of this study is to a) see the implementation of inclusive inclusive education which includes acceptance, planning, implementation, and evaluation for students; b) know the factors that support and hinder the implementation of inclusive schools; and c) knowing the positive impact and negative impact of the implementation of inclusive schools in Vocational High School 2 Malang. This type of research is qualitative research with a type of policy research, wherein in-depth study uses the technique of collecting data directly from people in their natural environment. The results showed that implementation had been good in terms of acceptance, planning, implementation, and evaluation at SMK Negeri 2 Malang, which was followed by special needs students with autism, mental disability, ADHD, slow learners, deaf people, and multiple impairments (more) Internal and external supporting factors are collaborations from various inclusive education actors, the government, guardian parents of students, communities around the school, and special accompanying teachers. Internal and external inhibiting factors, lack of infrastructure assistance from the government. The positive impact of the implementation of inclusive education in Vocational High School 2 Malang is the support of all parties to inclusive education, for the negative impact of this research in the inhibiting factors, namely the lack of infrastructure assistance from the government. Researcher's suggestion, schools should always send letters to the government in terms of infrastructure assistance so that the government can be quick to respond to this. Can also look for sponsors through CSR (Corporate Social Responsibility), self-funding from parents of guardian students, and raising from public funds.

Kata Kunci: Implementation, Inclusive Education, The Child with Special Needed

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR SUSUNAN DEWAN PENGUJI	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
I. PENDAHULUAN	1
II.TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Kebijakan Pendidikan Inklusif.....	5
B. Pendidikan Inklusif	5
C. Prinsip-Prinsip Penyelenggara Pendidikan Inklusif.....	7
D. Komponen Pendidikan Inklusif	7
E. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendidikan Inklusif.....	11
F. Model Pendidikan Inklusif	12
G. Program Kekhususan Inklusif.....	13
H. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).....	14
III. METODE PENELITIAN	15
A. Jenis Penelitian.....	15
B. Tempat dan Waktu Penelitian	16
C. Teknik Operasional	16
D. Teknik Analisis Data.....	17
E. Keabsahan Data	17
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	18
A. Hasil Penelitian	18
B. Pembahasan Penelitian.....	26
V. SIMPULAN DAN SARAN	31
A. Simpulan	31
B. Saran.....	32
VI. RUJUKAN.....	33

I. PENDAHULUAN

Umumnya pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Depdiknas, 2003). Maka dari itu, inti dari pendidikan inklusif yaitu tentang hak azasi manusia atas pendidikan yang didapatkan pada masing-masing individu. Konsekuensi yang logis dari hak tersebut yaitu dari semua anak semuanya mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang tidak ada lagi diskriminasi untuk hal kecacatan, suku, ras, etnis, agama, bahasa, kemampuan, jenis kelamin dan lain sebagainya. Pada intinya pendidikan inklusif sendiri bertujuan untuk berlangsungnya pendidikan oleh anak, guru, orang tua serta untuk masyarakat sekitar supaya semua bisa mendukung penuh dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan dibidang inklusif.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maupun dalam Peraturan Mendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa (Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2009).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan pasal 1, dijelaskan bahwa tujuan pembinaan untuk peserta didik adalah: a) mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. b) memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. c) mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat. d) menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi

manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (*civil society*). Tujuan dari pembinaan peserta didik adalah mengembangkan potensi siswa, memantapkan kepribadian siswa, mengaktualisasikan potensi siswa dan juga menyiapkan siswa agar menjadi masyarakat yang memiliki akhlaq mulia, demokratis dan menghormati hak-hak asasi manusia (M. Pendidikan, 2008).

Pentingnya perhatian sektor pendidikan untuk pembangunan, sebab pendidikan menyediakan sumber daya manusia yang selalu ikut serta dalam melancarkan pembangunan nasional pada suatu negara (Mujahidin, 2016). Akibatnya pendidikan sangatlah penting maka dari itu pemerintah berkewajiban sebagai pemenuh hak setiap negara. Pendidikan sebagai hak, memberikan sebuah beban bagi pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi yang menerima hak tersebut. Sebab itu pemerintah memposisikan pendidikan sebagai kebutuhan, dengan demikian anak berkebutuhan khusus (tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak berkesulitan belajar serta ketunaan lainnya) memiliki kesempatan yang sama pula dalam mendapatkan pendidikan (Supriyoko, 2004).

Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang didasari semangat terbuka untuk merangkul semua kalangan dalam pendidikan Rochyadi (2012). Menurut Tahir (2011), pendidikan inklusif merupakan implementasi pendidikan yang berwawasan multikural yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian, dan keberfungsian fisik maupun psikologis. Keberhasilan program pendidikan inklusif membutuhkan instrument input yang memadai, salah satunya yaitu peran profesional dari guru pendamping khusus (GPK). GPK disini merupakan guru yang memiliki tugas mendampingi di sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif dan mempunyai kompetensi menangani peserta didik yang disabilitas (Azizah, 2016).

Peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif mewadahi seluruh peserta didik yang regular maupun peserta didik yang berkebutuhan

khusus (ABK). Jenis ABK tersebut yaitu: a) tunanetra, b) tunarungu, c) tunawicara, d) tunagrahita, e) tunadaksa, f) tunalaras, g) berkesulitan belajar, h) lamban belajar, i) autisme, j) memiliki gangguan motorik, k) menjadi korban penyalahgunaan narkoba, l) tunaganda, m) cerdas dan berbakat istimewa, n) memiliki kelainan lainnya (Muhammad, 2017). Kementerian Sosial RI, tahun 2011 jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia telah berkembang mencapai 7 juta orang atau sekitar 3% dari total penduduk di Indonesia yang jumlahnya 238 juta. Dari jumlah tersebut sebagian besar peserta didik lambat (*slow learner*), termasuk autisme dan tuna grahita 60%. Maka pendidikan yang diutamakan yaitu pengembangan keterampilan dan kemampuan motorik. Model pendidikan semacam ini bisa didapatkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (RI, 2011).

Sudah beberapa tahun pendidikan inklusif diperkenalkan di Indonesia, keberadaan sekolah inklusif ini belum menyentuh level SMK. Tetapi SMK Negeri 2 Malang ditunjuk oleh Dinas Kota Malang dan mencoba untuk menerapkan pendidikan inklusif. Yang artinya sudah ada inovasi untuk membuka pendidikan inklusif di tingkat SMK, salah satu tantangan yang cukup sulit dihadapi di lapangan yaitu kesiapan warga sekolah antara lain: a) manajemen pendidikan inklusif, b) pemahaman guru reguler dalam memberikan pembelajaran peserta didik inklusif untuk mengembangkan pembelajaran inklusif di kelas, serta c) memberikan sosialisasi kepada peserta didik reguler tentang bagaimana menyikapi keberadaan peserta didik inklusif di sekolah mereka (Arlina, 2016).

SMK merupakan pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan keterampilan siswanya (Maknun, 2006). Keterampilan yang dimiliki merupakan hasil pembelajaran di sekolah maupun industri. Dunia industri berperan sangat penting dalam proses pembelajaran di SMK, dengan bekerja sama dalam pelaksanaan praktik industri. Praktik industri ini diperuntukan bagi siswa SMK dalam menerapkan ilmu yang pernah diperoleh di bangku sekolah. Peserta didik

juga akan mendapatkan ilmu baru di industri, sebab mereka juga belajar pada kondisi nyata dengan suasana kerja yang sebenarnya. Setelah selesai melaksanakan praktik industri peserta didik akan disibukkan dengan berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai kelulusannya. Peserta didik menengah kejuruan dinyatakan lulus apabila mereka berhasil mengikuti dan menyelesaikan ujian sekolah, ujian nasional, serta uji praktek kejuruan siswa. Uji praktek siswa dilaksanakan sesuai dengan kompetensi keahlian serta pelaksanaannya sebelum ujian nasional (Sukardi, 2011).

Yanuvianti, dkk (2015), mengartikan anak dengan kebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki perbedaan dari anak normal pada umumnya yang memiliki ciri fisik, kemampuan sensorik, neuromuscular, perilaku sosial juga emosional. Sehingga mereka memerlukan perlakuan khusus dalam hal pengajaran, tugas-tugas yang dimodifikasi serta pelayanan yang sesuai dengan kemampuan anak sehingga siswa bisa memaksimalkan potensi dan kapasitasnya secara maksimal. Sedangkan Abdullah (2013), Alfian (2013), Gainan (2013), mendefinisikan anak dengan kebutuhan khusus sebagai anak yang memerlukan persyaratan pendidikan yang berbeda dari rata-rata anak normal, dan untuk belajar secara efektif memerlukan program, pelayanan, fasilitas, dan materi khusus. SMK berbasis keterampilan hanya ABK tertentu saja yang cocok belajar di SMK ini, seperti ABK dengan ketunaan tuna rungu, tuna grahita, autisme, slow learner, low vision ringan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pendidikan Inklusi Di SMK Negeri 2 Malang”, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu:

- a) Bagaimana implementasi pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang?
- b) Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang?
- c) Bagaimana dampak dari implementasi pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang?

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pendidikan Inklusif

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 yang berbunyi: Ayat (1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, serta sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat (2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: Tunanetra, Tunarungu, Tunawicara, Tunagrahita, Tunadaksa, Tunalaras, Berkesulitan belajar, Hambatan belajar, Autis, Memiliki gangguan motorik, Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, Memiliki kelainan lainnya, Tunaganda (Sulistiyadi, 2014).

Penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk membangun tatanan masyarakat inklusif (*inklusif society*) (ESCAP, 2015). Pemerintah melalui PP. No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 41 (1) telah mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusif dengan menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus (Alfian, 2013).

B. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif ini merupakan sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh, yang kelak diharapkan bisa memberi jaminan bahwa strategi nasional tentang “Pendidikan Untuk Semua” benar-benar dimiliki semua kalangan, tidak membedakan apakah mereka tergolong anak-anak berkecenderungan atau tidak (Abdullah, 2013). Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang

bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (difabel). Namun sistem pendidikan di Indonesia disayangkan sekali karena belum mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan fisik maupun mental yang dimiliki oleh siswa. Jelas segmentasi lembaga pendidikan ini telah menghambat para peserta didik untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat (Mohd Nasir et al., 2015).

Konsep dasar pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah regular yang dekat dengan tempat tinggalnya. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atas akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi. Pihak sekolah dituntut untuk melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun system pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik (Ro'fah, dkk, 2010).

Sulistiyadi (2014), Nurharjadmo (2017) dan Tahir (2011) menyatakan bahwa pendidikan inklusif merupakan: 1) Layanan yang tepat karena didasarkan pada keunikan dan karakteristik individu, 2) Layanan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan disekolah umum bersama anak lainnya, 3) Upaya untuk meningkatkan kualitas program pendidikan bagi semua peserta didik, 4) Wadah dimana anak mendapatkan perhatian sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak.

Pendidikan inklusif merupakan praktek penyelenggaraan yang bertujuan untuk pemenuhan hak azasi manusia atas pendidikan, tanpa adanya diskriminasi, dengan memberi kesempatan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak tanpa perkecualian, sehingga semua anak

memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi pribadinya dalam lingkungan yang sama. Pendidikan inklusif juga bertujuan untuk membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar serta membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah pada seluruh warga negara (Depdiknas, 2010).

C. Prinsip-Prinsip Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Tataran praktis suatu pembelajaran bahwa inklusif merupakan suatu perubahan yang menguntungkan ABK tidak hanya ABK tetapi juga anak pada umumnya di dalam kelas reguler. Prinsip paling mendasar dalam pendidikan inklusif merupakan bagaimana supaya peserta didik dapat belajar bersama, belajar untuk dapat hidup bersama. Pendidikan (2010), menjabarkan ada tiga prinsip tentang penyelenggara pendidikan inklusif yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan sekolah yang ramah terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dan menghargai perbedaan.
2. Mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dengan cara: a) memperhatikan kondisi peserta didik yang berbeda, b) menggunakan kurikulum yang fleksibel, c) menggunakan metodologi pembelajaran yang bervariasi, d) memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, e) melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.
3. Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, ada prinsip pembelajaran untuk ABK yaitu: a) pengenalan diri, b) optimalisasi potensi, c) latihan kemandirian.

D. Komponen Pendidikan Inklusif

Mutu pendidikan (lulusan) dipengaruhi oleh mutu proses belajar mengajar. Sementara itu, mutu proses belajar-mengajar ditentukan oleh

berbagai faktor (komponen) yang saling terkait satu sama lain Hidayat (2014) yaitu:

1. Input Siswa

Manajemen peserta didik meliputi: a) Penerimaan peserta didik baru, meliputi aspek identifikasi, assesmen dan penempatan peserta didik, b) Program bimbingan dan konseling, c) Pengelompokan belajar peserta didik, d) Kehadiran peserta didik, e) Mutasi peserta didik, f) Papan statistik peserta didik yang menggambarkan secara holistik tentang basis data peserta didik, g) Buku induk peserta didik.

Penerimaan peserta didik baru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif hendaknya: a) kuota minimal dalam satu rombel yaitu satu peserta didik berkebutuhan khusus, b) prioritas diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, c) apabila pendaftar lebih dari yang dibutuhkan, penetapannya diserahkan kepada kebijakan sekolah penyelenggara, d) penerimaan peserta didik mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah (D. Pendidikan, 2010).

2. Kurikulum (bahan ajar)

Manajemen kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan khusus peserta didik, data tentang kebutuhan khusus siswa dapat diperoleh dari profil setiap peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus (Widyaiswara, 2014).

Secara diagram manajemen kurikulum pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat digambarkan sebagai berikut:

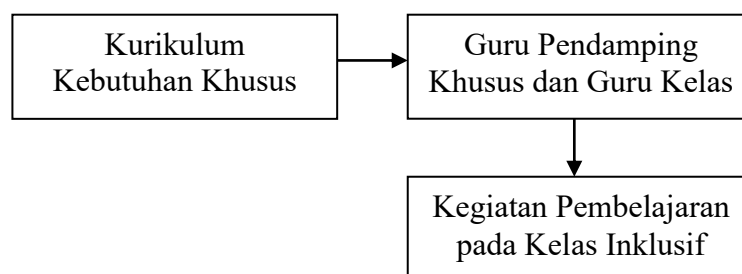


Diagram 1. Sistem Manajemen Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

3. Perencanaan Kegiatan Pembelajaran

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang kegiatan pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif antara lain seperti berikut:

- a. Menetapkan Tujuan Pembelajaran
- b. Merencanakan Pengelolaan Kelas
- c. Merencanakan Pengorganisasian Bahan
- d. Merencanakan Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran
- e. Merencanakan Penggunaan Sumber Belajar
- f. Merencanakan Penilaian

4. Proses Belajar Mengajar

Dalam proses pembelajaran di kelas regular ini yang bertanggung jawab dalam mengelola pembelajaran ialah guru kelas atau guru mata pelajaran dibantu dengan guru pembimbing khusus atau tenaga kependidikan lain yang berkompeten.

Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik dan keagamaan gaya belajarnya. Pendekatan pembelajaran PAKEM merupakan contoh yang baik dalam implementasi pembelajaran karena menggunakan pembelajaran aktif dan berpusat kepada peserta didik.

Modifikasi dalam proses pembelajaran di kelas inklusif yaitu sebagai berikut:

- a. Waktu belajar diperpanjang
- b. Pembelajaran sewaktu-waktu dilaksanakan di kelas khusus (*resource room*)
- c. Penggunaan alat bantu khusus dalam pembelajaran
- d. Penempatan tempat duduk pada lokasi tertentu (dekat guru)
- e. Pemanfaatan peserta didik “normal” sebagai tutor
- f. Pemberian tugas khusus yang berbeda dengan peserta didik lain
- g. Pemberian penjelasan atau pembelajaran khusus di luar jam belajar umum.

5. Pengelolaan dalam Pembelajaran

Pengelolaan merupakan suatu proses penataan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen tentu gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati. Lenawati, dkk (2015), mengatakan bahwa “pengelolaan adalah keterampilan untuk meramu komponen dan unsur-unsur yang terlibat dalam suatu sistem untuk mencapai hasil/tujuan yang direncanakan”. Sedangkan menurut Taufiqurrahman (2016) dan (Murniati, dkk (2016), “Pengelolaan didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasional atau lembaga”. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan pembelajaran merupakan suatu proses penyelenggaraan interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Ali, dkk (2013), proses pembelajaran berada dalam empat variable interaksi, yaitu:

- a. Variabel pertanda (presage variables) berupa pendidik
- b. Variabel konteks (context variables) berupa peserta didik
- c. Variabel proses (process variables) berupa pembelajaran
- d. Variabel produk (product variables) berupa perkembangan peserta didik baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

6. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Khusus-Layanan Khusus bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten untuk SD/SMP/SMA dan SMK. Untuk MI/MTs dan MA, monitoring dan

evaluasi juga dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama di wilayah masing-masing.

Monitoring penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan dengan bantuan serta dukungan perguruan tinggi LPTK PK/LB dan lembaga-lembaga terkait yang memiliki kompetensi dalam pengembangan pendidikan inklusif. Dalam mengelola satuan pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif dilakukan evaluasi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Evaluasi keberhasilan tersebut dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menetapkan indicator untuk menentukan keberhasilan
- b. Menyusun berbagai instrument evaluasi
- c. Melakukan pencatatan terhadap pencapaian indikator.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendidikan Inklusif

Depdiknas, (2010) menjabarkan beberapa faktor pendukung dan penghambat didalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif hendaknya didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan melibatkan berbagai unsur terkait, maka dari itu perlu, a) adanya program yang jelas dan dapat diterima oleh semua pihak, sehingga pelaksanaan pendidikan inklusif dapat diterima dengan baik dan berkembang, b) sarana dan prasarana serta tenaga kependidikan dipersiapkan dengan matang sesuai kebutuhan anak berkebutuhan khusus di sekolah, c) adanya komitmen untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif, dan d) adanya kerjasama yang solid dari semua pihak.

2. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif, terdapat beberapa jenis hambatan seperti: a) *Practical Barriers* meliputi: sarana dan prasarana, pembiayaan, kondisi geografis, dan lain-lain

(kurangnya sumber daya manusia yang ada di sekolah, sarana dan prasarana penunjang pendidikan inklusif belum memadai, guru belum memahami bagaimana cara menangani siswa berkebutuhan khusus di dalam kelasnya, dan guru tidak terbiasa menyusun program yang bervariasi untuk mengakomodasi semua jenis kebutuhan siswa), b) *Power Barriers* (hambatan dari para pemegang kekuasaan). Misalnya: aturan yang dibuat, tata tertib, izin, dan sebagainya yang tidak memberi peluang terselenggaranya pendidikan inklusif dan program tahunan sekolah sudah terpola sehingga tidak memberikan peluang untuk terselenggaranya pendidikan inklusif, c) *Psychological Barriers* merupakan kondisi psikologis baik para pelaksana maupun peserta didik yang tidak percaya diri atau belum siap melaksanakan pendidikan inklusif (tenaga pendidik belum siap dalam melaksanakan program yang telah disusun tidak dapat terlaksana sesuai apa yang diinginkan jika semua unsur sekolah dan masyarakat tidak mendukung) serta d) *Value Barriers*, yang menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus yang mempunyai kemampuan marginal dianggap tidak memiliki kegunaan.

F. Model Pendidikan Inklusif

Pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif dapat dilakukan dengan berbagai model, ada model kelas regular (inklusif penuh) dimana kelas tersebut menampung anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus sepanjang hari di kelas regular dengan menggunakan kurikulum yang sama (Norliah dan Hanafi, 2016). Untuk selanjutnya ada kelas regular dengan cluster dimana kelas ini menampung anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas regular dalam kelompok khusus. Untuk kelas regular dengan pull out menampung anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas regular namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas regular ke ruang lain untuk belajar

dengan guru pembimbing khusus. Yang selanjutnya ada kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian digunakan untuk anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler. Dan yang terakhir ada kelas khusus penuh diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler

Model pendidikan inklusif sangat penting untuk diketahui oleh setiap penyelenggara pendidikan inklusif karena dengan penentuan model yang tepat maka peserta didik yang inklusif tidak merasa dibedakan dan mendapatkan yang menjadi hak dan kewajiban setiap anak berkebutuhan khusus. Pemilihan model kelas inklusif juga bertujuan untuk memudahkan penyelenggara dalam mengidentifikasi atau mengukur tingkat kesiapan setiap anak inklusif dalam proses belajar mengajar (Fuadi, 2015).

G. Program Kekhususan Inklusif

Pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem sekolah. Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi (Ro'fah, 2010).

Dalam buku pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif, pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan:

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
2. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar.
3. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah.

4. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran.

H. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

SMK merupakan salah satu dari penyelenggara pendidikan dan SMK sebagai salah satu lembaga pendidikan kejuruan memiliki tugas untuk mempersiapkan peserta didiknya untuk dapat bekerja pada bidang-bidang tertentu, dalam proses pembelajarannya, SMK dilengkapi dengan ilmu pengetahuan secara teori dan membekali peserta didik melalui praktik sehingga dalam perkembangannya SMK dituntut harus mampu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. SMK sebagai pencetak tenaga kerja yang siap pakai harus membekali peserta didiknya dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kompetensi program keahlian mereka masing-masing (Maknun, 2006).

Lulusan SMK berperan dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja sebagai tenaga kerja tingkat menengah, selain diharuskan menguasai kompetensi di bidangnya juga harus mampu melakukan pengembangan diri sebagai upaya agar tetap mampu berkompetisi pada saat ini maupun untuk masa yang akan datang (Kejuruan, 2013). SMK membekali lulusannya dengan kemampuan kognitif (pengetahuan) dan kemampuan psikomotorik (keterampilan/skill), tidak kalah pentingnya adalah membekali lulusannya dengan kemampuan adaptif, yaitu kemampuan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan diri sesuai dengan perkembangan teknologi dan industri yang ada. Kemampuan adaptif yang diberikan berupa materi pengetahuan dasar di bidang teknologi.

Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (DIRJEN MANDIKDASMEN) Nomor: 251/ C/ KEP/ MN/ 2008 spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan memuat bidang studi keahlian, program studi keahlian dan kompetensi keahlian. Spektrum merupakan acuan dalam penyelenggaraan SMK, dalam

keputusan tersebut program pendidikan pada SMK dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bidang Studi Keahlian adalah kelompok atau rumpun keahlian pada SMK yang terdiri atas:
 - a) Teknologi dan Rekayasa b) Teknologi dan Informasi c) Kesehatan
 - d) Seni, Kerajinan dan Pariwisata e) Agribisnis dan Agroteknologi f) Bisnis dan Manajemen.
2. Program Studi Keahlian adalah jurusan dalam suatu bidang studi keahlian atau pada spektrum sebelumnya disebut bidang keahlian.
3. Kompetensi Keahlian adalah spesialisasi dalam suatu program studi keahlian atau pada spektrum sebelumnya disebut program keahlian.

Teknologi dan Rekayasa merupakan salah satu rumpun atau kelompok keahlian pada SMK, yang mana di dalamnya terdapat beberapa Program Studi Keahlian salah satunya adalah Teknik Otomotif. Teknik Otomotif memuat beberapa Kompetensi Keahlian, antara lain: a) Teknik Kendaraan Ringan b) Teknik Sepeda Motor c) Teknik Perbaikan Bodi Otomotif d) Teknik Alat Berat e) Teknik Ototronik.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian yang mendalam dengan menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya. Penelitian ditujukan untuk mendiskrisikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Fokus penelitian ini pada implementasi kebijakan sekolah inklusif yang terdapat di SMK Negeri 2 Malang.

Subjek informannya mengetahui orang-orang yang mengetahui, berkaitan, dan menjadi pelaku dari suatu kegiatan yang diharapkan dapat memberi informasi. Adapun subjek penelitian ini yaitu kepala sekolah,

wakil kepala sekolah bidang kurikulum, manager inklusif, guru pendamping khusus.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 2 Malang, lokasi ini dipilih karena ingin mengetahui pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Penelitian ini dilakukan di tahun ajaran 2018-2019, semester genap.

C. Teknik Operasional

Teknik pengumpulan data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara penelitian ini wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) bebas atau wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui secara detail mengenai fokus penelitian dengan menanyakan langsung kepada yaitu kepala sekolah, guru kelas, serta GPK SMK Negeri 2 Malang. Sehingga didapatkan data-data yang valid dari narasumber yang terkait dengan fokus penelitian.

2. Dokumen

Dokumen dalam penelitian ini berupa dokumen resmi dalam bentuk dokumen internal yang dimiliki sekolah SMK Negeri 2 Malang penyelenggara pendidikan inklusif. Dokumen ini bertujuan untuk mengetahui data-data di sekolah SMK Negeri 2 Malang yang diperlukan pada penelitian. Dokumen yang dijadikan acuan dalam penelitian yaitu Pedoman Teknis Penyelenggaraan Inklusif dari dinas pendidikan provinsi Jawa Timur yang digunakan di SMK Negeri 2 Malang.

3. Data Pelengkap

Data pelengkap dalam penelitian ini berupa foto, yang menjadi data pelengkap. Data observasi dijadikan pelengkap sebab foto diambil setelah libur sekolah, dikarenakan pada saat melakukan penelitian peserta didik libur sekolah.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menguraikan keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh agar data-data tersebut dapat dipahami bukan saja oleh orang yang meneliti (peneliti), tetapi juga oleh orang lain bertujuan mengetahui hasil penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data bersifat interaktif, berlangsung dalam lingkaran yang saling tumpang tindih (Nana, 2008). Analisis kualitatif cenderung menggunakan pendekatan logika induktif, dimana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal yang khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum sampai kesimpulan khusus (Burhan, 2009).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif. Data dan sumber data yang digunakan peneliti didalam menggali jawaban dari permasalahan menggunakan teknik wawancara pihak yang berwenang, disamping itu peneliti juga menggunakan dokumen-dokumen didalam mencari jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu dengan cara wawancara, melihat dokumen-dokumen dari SMK Negeri 2 Malang, serta observasi berupa foto sebagai pendukung.

E. Keabsahan Data

Untuk menguji validitas data dalam penelitian kualitatif ini, sehingga valid serta dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti menggunakan *triangulasi*. *Triangulasi* yang digunakan oleh peneliti digunakan untuk menguji kredibilitas data yaitu triangulasi dengan sumber data, dengan langkah seperti berikut: 1) membandingkan data hasil dari wawancara dengan data hasil pengamatan langsung; 2) membandingkan apa yang disampaikan di depan umum dengan apa yang disampaikan secara pribadi; 3) membandingkan hasil wawancara dengan isi dari dokumen dengan metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi dari hasil penelitian itu digabungkan sehingga saling melengkapi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi Pendidikan Inklusif di SMK Negeri 2 Malang

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di SMK Negeri 2 Malang terdiri dari berbagai macam ketunaan maka dari itu penjurusan peserta didik berkebutuhan khusus pada program keahlian dilihat dari faktor ketunaan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus yang diterima di SMK Negeri 2 Malang.

Peserta didik yang memiliki ketunaan autisme dan tuna grahita cenderung kurang berinteraksi dengan lingkungannya, termasuk mempunyai hambatan dalam berkomunikasi, maka dari itu peserta didik berkebutuhan khusus berada di jurusan Akomodasi Perhotelan (AP). Sedangkan di jurusan keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ) ada peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki ketunaan pada pendengaran atau tuna rungu.

Tabel. 1 Data Peserta Didik Berkebutuhan Khusus SMK Negeri 2 Malang Tahun Ajaran 2018/2019.

No.	Kelas	Kejuruan	Jumlah	Keterangan
1	X	Akomodasi Perhotelan	8 ABK	Autis, Tuna Grahita, Down Syndrome
		Teknik Komputer Jaringan	3 ABK	Tuna Rungu
2	XI	Akomodasi Perhotelan	7 ABK	Autis, Tuna Grahita, ADHD, Slow Learner
		Teknik Komputer Jaringan	5 ABK	Tuna Rungu
3	XII	Akomodasi Perhotelan	9 ABK	Autis, Tuna Grahita, Low Vision Ringan
		Teknik Komputer Jaringan	1 ABK	Tuna Rungu Wicara (Ganda)

Implementasi sekolah inklusif di SMK Negeri 2 Malang sudah terlaksana dengan baik, berikut hasil wawancara dengan kepala sekolah dan GPK berkaitan dengan implementasi sekolah inklusif ada beberapa poin, yang pertama bahwa SMK Negeri 2 Malang telah melaksanakan sudah sekitar sembilan tahun yang pertama dimulai pada tahun 2010 yang lalu. Dimana SMK Negeri 2 Malang ditunjuk langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Malang untuk melaksanakan sekolah inklusif.

Hal ini bisa dilihat dari pernyataan dari kepala sekolah SMK Negeri 2 Malang, sebagai berikut:

“SMK Negeri 2 Malang telah melaksanakan program pendidikan inklusif sejak tahun 2010 dimana saat itu SMK Negeri 2 Malang ditunjuk langsung untuk melaksanakan sekolah inklusif” (BG/10/10/2018).

Poin yang kedua yakni dalam kurikulum SMK Negeri 2 Malang menerapkan akomodasi kurikulum disediakan bagi siswa tidak mampu mengikuti kurikulum regular. Dimana akomodasi kurikulum yaitu kurikulum regular yang diadaptasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didiknya. Poin ketiga adanya pembatasan dalam menerima ABK yang diberlakukan oleh sekolah SMK Negeri 2 Malang, dan poin keempat yakni adanya jurusan yang lebih mengedepankan bidang keahlian, hal ini ditandai dengan adanya jurusan yang bisa diperuntukkan untuk ABK yaitu AP dan TKJ dimana penjurusannya menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing dari ABK yang diterima di SMK Negeri 2 Malang.

Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh GPK di SMK Negeri 2 Malang, yaitu:

“SMK Negeri 2 Malang menerapkan akomodasi kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak mampu mengikuti kurikulum regular” (EE/9/10/2018).

“Pada setiap angkatan, SMK Negeri 2 Malang menerima kurang lebih 10 peserta didik berkebutuhan khusus lewat jalur offline” (EE/9/10/2018).

“Jurusan untuk peserta didik berkebutuhan khusus yaitu AP dan TKJ, namun untuk penjurusannya disesuaikan dengan kemampuan peserta didik setelah adanya identifikasi dan asesmen” (EE/9/10/2018).

Kekuasaan dalam hal ini dipegang oleh Wali Kota melalui Dinas Pendidikan juga sudah berperan aktif dalam mensosialisasikan Permendiknas No. 70 tahun 2009 yang menyatakan sekolah wajib dalam menerima siswa berkebutuhan khusus tanpa terkecuali, hal tersebut sangat penting dilakukan agar tidak ada lagi ABK dimana biasanya tidak mendapatkan hak dalam pendidikan yang layak. Dalam hal ini pula Pemerintah Daerah beserta Provinsi bekerja sama dengan sangat baik. Dan pemerintah daerah selalu mengikutsertakan GPK di SMK Negeri 2 Malang dan GPK di undang dalam kegiatan sosialisasi maupun dalam rangka peningkatan kualitas dari GPK di SMK Negeri 2 Malang itu sendiri.

Penyelenggaraan program sekolah inklusif bila ingin berhasil bisa dilihat dari berbagai faktor diantaranya, tentang kepatuhan terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah maupun sekolah, kesiapan pelaku pendidik dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif, serta adanya dukungan penuh dari semua pihak yang memiliki kepentingan yang sejalan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

a. Penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SMK Negeri 2 Malang

SMK Negeri 2 Malang mengadakan program pendidikan inklusif dalam penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus jumlahnya bisa menyesuaikan dengan keadaan sekolah di SMK Negeri 2 Malang sebab tidak semua peserta didik berkebutuhan khusus yang baru bisa diterima SMK Negeri 2 Malang.

Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh Guru Reguler dan GPK di SMK Negeri 2 Malang, yaitu:

“Bisa 10 peserta didik berkebutuhan khusus saja yang diterima, untuk minimal 1 rombel di isi dengan 1 peserta didik

berkebutuhan khusus maksimalnya 2 sampai 3 peserta didik. Dan pihak sekolah juga akan menerima peserta didik berkebutuhan khusus yang telah siap disekolahkan di sekolah inklusif (sekolah bersama anak regular biasa)” (TH/21/01/2019).

“Maksimal untuk diterimanya peserta didik berkebutuhan khusus di SMK Negeri 2 Malang ada 10 peserta didik saja. Dikarenakan menyesuaikan sarana prasarana di sekolah, serta peserta didik berkebutuhan khusus yang bisa kita terima yaitu peserta didik berkebutuhan khusus yang mampu pihak sekolah layani (sesuai dengan kemampuan dan sarana prasarana sekolah di SMK Negeri 2 Malang)” (EE/9/10/2018).

Prioritas diberikan sekolah untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya terdekat dan telah siap dalam beberapa kriteria yang sudah ditetapkan oleh sekolah, salah satunya dari segi perilaku.

Hal tersebut bisa dijelaskan ketika wawancara dengan GPK di SMK Negeri 2 Malang, yaitu:

“Peserta didik berkebutuhan khusus mengapa terdekat yang menjadi prioritas, dikarenakan saat ini berlakunya kebijakan serta sistem zonasi sekolah. Namun, terkadang pihak sekolah juga harus memperhatikan bakat dan minat peserta didik serta kemampuan maupun kesiapan perilaku dari masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus untuk memilih sekolah serta jurusan yang tepat pula” (EE/9/10/2018).

Hal ini menyatakan bahwa dalam penerimaan peserta didik ABK yang diterima tidak hanya yang terdekat dengan sekolah tetapi juga melihat kemampuan peserta didik dalam segi perilaku maupun keterampilan apa saja yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik ABK serta dari pihak sekolah dirasa mampu untuk menangani peserta didik ABK yang mendaftar di SMK Negeri 2 Malang. Maka dari itu sekolah juga tidak main-main dalam menerima peserta didik sebab bisa berdampak kepada peserta didik ABK yang nantinya sekolah di SMK Negeri 2 Malang. Karena pihak sekolah menginginkan yang terbaik baik peserta didik ABK di sekolah tersebut.

b. Perencanaan Kegiatan Pembelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SMK Negeri 2 Malang

Perencanaan kegiatan pembelajaran pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang semuanya di sesuaikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus.

Hal tersebut sesuai dengan dinyatakan oleh GPK, yaitu:

“Dalam perencanaan kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian kami menyiapkan kurikulum yang dimana guru kelas bekerja sama dengan GPK harus mengadaptasi kurikulum dari regular agar sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan dari peserta didik berkebutuhan khusus di SMK Negeri 2 Malang setelah itu baru dilaksanakan di dalam kelas reguler” (EE/9/10/2018).

Perencanaan yang sesuai akan berdampak dengan apa yang diinginkan oleh semua pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 2 Malang. Dalam perencanaan di pembelajaran bersama peserta didik ABK tentunya tidak lupa adanya perencanaan yang sangat matang dan terstruktur dengan dimaksudkan agar pembelajaran di pendidikan inklusif SMK Negeri 2 Malang bisa berjalan sesuai dengan keinginan bersama. Perencanaan ini meliputi adanya persiapan dalam membuat kurikulum yang menyesuaikan dengan siapa yang di hadapi dan siapa pula yang harus diberi penjelasan dari suatu materi agar dapat memahami apa yang di sampaikan oleh masing-masing guru.

c. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SMK Negeri 2 Malang

Pelaksanaan pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang sudah bagus serta adanya modifikasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas reguler.

Hal ini bisa dinyatakan pada saat wawancara dengan guru kelas dan GPK, yaitu sebagai berikut:

“Pembelajaran sudah bagus untuk mata pelajaran produktif di kelas serta untuk mata pelajaran normatif adaptif kadang dikelas kadang juga di sumber belajar (kelas khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus). Untuk modifikasi pembelajaran di kelas reguler perlu sekali adanya modifikasi sebab menyesuaikan peserta didik berkebutuhan khusus yang saya hadapi” (TH/21/01/2019).

“Peserta didik dengan gangguan kecerdasan – sistem *pull out*. Peserta didik berkebutuhan khusus mengikuti pembelajaran di kelas reguler bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mampu mengikuti pembelajaran, apabila peserta didik tidak mampu, peserta didik berkebutuhan khusus belajar secara khusus di kelas sumber. Kemudian untuk peserta didik tanpa gangguan kecerdasan mengikuti kelas reguler secara penuh dengan pendampingan apabila di butuhkan. Modifikasi dalam kegiatan pembelajaran selalu dilakukan guru kelas karena menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik yang berkebutuhan khusus” (EE/9/10/2018).

Modifikasi selalu dilaksanakan dalam pelaksanaan pembelajaran bersama peserta didik ABK. Dimaksudkan untuk menyesuaikan kondisi yang biasanya normal dalam pembelajaran tetapi ini sudah tidak normal karena adanya peserta didik ABK dalam pembelajaran di kelas reguler.

d. Evaluasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SMK Negeri 2 Malang

Pelaksanaan evaluasi untuk pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang selalu dilaksanakan dan hasilnya selalu bagus sebab semuanya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan berkolaborasi. Adanya kolaborasi tersebut maka tercapainya kegiatan pembelajaran yang memuaskan.

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh guru kelas dan GPK, yaitu:

“Sudah bagus, adanya pendampingan oleh GPK yang sudah berpengalaman dibidangnya membantu sekali guru di kelas. Peserta didik berkebutuhan khusus juga bisa berbaur dengan teman-teman di kelas reguler, jadi pembelajaran di kelas sudah

bisa dikatakan berhasil dalam rangka pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang” (TH/21/01/2019).

“Peserta didik dengan gangguan kecerdasan, tidak wajib mengikuti UNBK bila tidak mampu, soal disusun oleh satuan pendidikan sesuai kemampuan siswa, memperoleh ijazah yang sama, hanya saja tidak memperoleh SKHUN. Kemudian untuk peserta didik tanpa gangguan kecerdasan, tetap mengikuti UNBK seperti anak sekolah reguler, soal disubstitusi sesuai identifikasi peserta didik. Contoh: untuk yang tuna rungu tidak ada soal listening semuanya reading dalam mata pelajaran Bahasa Inggris. Yang low vision tulisan diperbesar serta yang tuna netra tulisan untuk pembelajaran maupun dalam ujian, soalnya menggunakan huruf braille” (EE/9/10/2018).

Prosedur penetapan kelulusan bagi peserta didik ABK yang memiliki hambatan kecerdasan, peserta UNBK di SMK Negeri 2 Malang mengikuti prosedur, kriteria dan standar yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Dengan memperhatikan aspek usia dan kemampuan peserta didik ABK.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Sekolah Inklusif di SMK Negeri 2 Malang

a. Faktor Pendukung Internal dan Eksternal

Dukungan dalam hal penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang diantaranya adanya dukungan dan kolaborasi dengan pemerintah, orang tua wali murid, masyarakat sekitar sekolah, serta para guru pendamping khusus yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa dan psikologi turut memantau dan memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang, dukungan tersebut tidak hanya berupa moral tetapi juga dukungan materi.

Hal ini disebutkan dengan pernyataan Kepala Sekolah dan GPK:

“Dukungan seluruh pihak dan orang tua wali murid” (BG/10/10/2018).

“Kolaborasi dan dukungan pemerintah serta orang tua dan masyarakat sekitar sekolah” (EE/9/10/2018).

Sekolah SMK Negeri 2 Malang masih diberikan pelatihan oleh dinas pendidikan. Idealnya program pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang masih dalam proses pengembangan, maka dari itu peran perguruan tinggi juga sebetulnya dibutuhkan. Dalam penelitian kebijakan ini yang berkelanjutan, penyelenggara sekolah inklusif, pembelajaran yang berbasis program khusus sampai dengan bahan ajar disertai perangkat untuk pembelajaran berupa silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan media untuk anak berkebutuhan khusus serta penanganan dalam menghadapi ABK, juga penanganan untuk individual (dalam pengembangan kemampuan bakat minat) juga harus selalu di perbarui agar pelayanan di sekolah SMK Negeri 2 Malang bisa lebih baik dan selalu *ter-update*.

b. Faktor Penghambat Internal dan Eksternal

Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program sekolah inklusif disekolah SMK Negeri 2 Malang menurut kepala sekolah dan GPK, bisa dijelaskan dibawah ini:

“Kendala yang dihadapi SMK Negeri 2 Malang saat ini yaitu minimnya bantuan untuk sarana prasarana untuk penunjang kegiatan belajar mengajar” (BG/10/10/2018).

“Untuk sarana prasarana di SMK Negeri 2 Malang belum terpenuhi dengan baik. Pelatihan berkelanjutan juga sangat diperlukan guna memahami pribadi masing-masing ABK ditujukan GPK maupun guru regular” (EE/9/10/2018).

SMK Negeri 2 Malang dalam semua aspek yang disebutkan oleh DEPDIKNAS untuk mendukung suksesnya pendidikan inklusif semua sudah di laksanakan terkecuali dalam aspek sarana prasarana. Sarana prasarana di SMK Negeri 2 Malang masih minim sekali, penyebabnya di SMK Negeri 2 Malang kelas untuk ABK di gabung dengan ruang dan kantor bimbingan konseling (BK). Kemudian untuk

yang lainnya misalnya jalan yang ramah untuk pengguna kursi roda belum tersedia.

3. Dampak dari Implementasi Pendidikan Inklusif di SMK Negeri 2 Malang

a. Dampak Positif dari faktor pendukung implementasi pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang

Dampak positif yang dirasakan oleh SMK Negeri 2 Malang salah satu penyelenggara pendidikan inklusif di Malang yang bisa dibilang berhasil memberikan dampak yang baik pula terhadap semua pendukung pendidikan inklusif. Dengan adanya partisipasi aktif dari pihak kepala sekolah, GPK, guru kelas (reguler), orang tua wali murid ABK, serta masyarakat sekitar sekolah semuanya itu sangat membantu sedikit meringankan beban sekolah selaku yang melakukan program pendidikan inklusif terutama dalam bentuk bantuan materi. Semua pernyataan di atas sesuai dengan yang disampaikan oleh GPK berikut:

“Adanya dukungan dari semua pihak dari kepala sekolah, GPK, guru kelas (reguler), orang tua wali murid ABK sampai masyarakat sekitar sekolah merupakan suatu kebanggaan tersendiri yang diperoleh SMK Negeri 2 Malang dan hal tersebut bisa dijadikan suatu indikator bahwa SMK Negeri 2 Malang dalam menjalankan program pendidikan inklusif tersebut sudah sepenuhnya didukung oleh pihak bersangkutan” (EE/09/10/2018).

Kota Malang menjadi kota inklusif dimana adanya deklarasi yang disampaikan oleh pemerintah kota Malang, maka dari itu menjadikan suatu dukungan tersendiri untuk sekolah yang sedang melakukan program pendidikan inklusif dalam memberikan layanan terbaik di kota Malang. Sebab adanya hal tersebut SMK Negeri 2 Malang selalu meningkatkan dalam hal pelayanan di bidang pendidikan inklusif.

- b. Dampak Negatif dari faktor penghambat implementasi pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang

Suatu hambatan berdampak negatif untuk SMK Negeri 2 Malang dimana sekolah tersebut ialah sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif. Hambatan yang ditemui yaitu minimnya sarana prasarana di SMK Negeri 2 Malang berimbas kepada ABK tidak bisa semua kategori ABK diterima di SMK Negeri 2 Malang. Masih kurangnya pelatihan berkelanjutan untuk GPK yang berlatar belakang psikologi yang masih kesulitan untuk membuat silabus dan RPP menjadikan tidak efektifnya proses belajar mengajar. Dimana semua ini berdampak kurang berkembangnya pemahaman sekolah dalam memajukan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Pernyataan ini disampaikan oleh GPK SMK Negeri 2 Malang, sebagai berikut:

“Kurangnya perhatian pemerintah dalam bantuan untuk sarana prasarana SMK Negeri 2 Malang, masih kurang pelatihan-pelatihan lanjutan yang dilakukan pemerintah dimana bersifat resmi yang memberikan kebijakan bahwa untuk GPK berlatar belakang dari psikologi yang melakukan proses belajar mengajar diharuskan mengikuti pelatihan dalam meningkatkan proses belajar mengajar” (EE/09/10/2018).

Peran sekolah terutama peran pemerintah sangat diperlukan dalam membantu untuk pelaksanaan pengembangan serta pembangunan pendidikan inklusif. Terutama dalam membantu sarana prasarana, sebab hal utama yang seharusnya tidak ada masalah yaitu dalam pembangunan. Sebab bila sarana prasarana belum bisa terpenuhi maka selalu berdampak pada penerimaan yang terbatas. Alasan dalam penerimaan hanya diterima 10 peserta didik dari setiap tahun ajaran dari belum terpenuhinya sarana prasarana di SMK Negeri 2 Malang.

Pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebaiknya selalu dilaksanakan untuk pemenuhan guru pendamping khusus yang berlatar belakang psikologi. Pelatihan tersebut bisa membantu GPK yang berlatar belakang psikologi dalam pemahaman dalam menghadapi

peserta didik ABK agar berjalannya proses mengajar dengan menyenangkan tanpa adanya hambatan dan tekanan terhadap pemahaman masing-masing peserta didik.

B. Pembahasan Penelitian

Dalam penerimaan peserta didik, pihak sekolah melaksanakannya dengan cara melakukan observasi terhadap peserta didik yang mendaftar di SMK Negeri 2 Malang. Ada soal yang meliputi kemampuan akademik dasar serta beberapa psikotes. Kemudian bila ditemukan peserta didik yang tanpa adanya hambatan kecerdasan bisa memilih jurusan TKJ, tetapi bila ada hambatan kecerdasan oleh petugas penerimaan peserta didik ABK diarahkan di jurusan AP. Dimana AP merupakan jurusan yang sangat cocok dengan peserta didik ABK yang seperti autis, tuna grahita, ADHD, low vision, serta slow learner.

Peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di SMK Negeri 2 Malang terdiri dari berbagai ketunaan, maka dari itu dalam penempatan program keahlian dilihat dari faktor dari ketunaan masing-masing peserta didik. Oleh sebab itu peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kriteria seperti diuraikan sebelumnya masuk di program keahlian AP. Di program keahlian AP ini peserta didik berkebutuhan khusus lebih banyak interaksinya dengan benda-benda mati dimana tidak berhubungan dengan manusia, praktiknya seperti membersihkan tempat tidur, menyapu lantai, membersihkan sampah, mencuci baju, sehingga kemampuan motorik peserta didik berkebutuhan khusus lebih berkembang lagi.

Peserta didik ABK yang tuna rungu dikhususkan masuk dalam jurusan TKJ, dikarenakan peserta didik ABK yang tuna rungu dalam pemahaman materi masih bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru karena peserta didik tuna rungu tidak ada gangguan dalam hal kecerdasan sebab di jurusan TKJ harus memiliki kemampuan daya ingat maupun kemampuan kreativitas yang tinggi. Jadi peserta didik ABK yang diterima di

SMK Negeri 2 Malang dengan hanya ketunaan tuna rungu saja bisa masuk di jurusan TKJ.

Peserta didik berkebutuhan khusus yang ketunaannya tuna rungu (sulit dalam hal pendengaran) penempatan untuk keahliannya di TKJ. Hal ini disebabkan karena peserta didik yang ketunaan seperti ini masih bisa beradaptasi dengan teman regulernya walaupun menggunakan Bahasa isyarat serta untuk kecerdasannya juga lebih dibandingkan dengan peserta didik dengan ketunaan lain dari tuna rungu (Hasyim, 2013).

Perencanaan kegiatan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus di SMK Negeri 2 Malang semuanya disesuaikan dengan kemampuan serta ketunaan masing-masing dari peserta didik. Tentang menyiapkan kurikulum dimana guru kelas bekerja sama dengan GPK untuk mengadaptasi kurikulum dari reguler agar sesuai dengan kemampuan masing-masing ketunaan, biasanya disebut dengan kurikulum modifikasi.

Kurikulum modifikasi tersebut merupakan: a) duplikasi dari kurikulum, yaitu peserta didik inklusif menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan peserta didik rata-rata atau reguler. Model kurikulum ini cocok digunakan untuk peserta didik tunanetra, tunarungu wicara, tunadaksa, serta tunalaras; b) modifikasi kurikulum, yaitu kurikulum peserta didik rata-rata atau reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Modifikasi kurikulum kebawah diberikan kepada peserta didik tunagrahita dan modifikasi kurikulum keatas untuk peserta didik yang mempunyai bakat lebih; c) substitusi kurikulum, yaitu beberapa bagian kurikulum peserta didik rata-rata ditiadakan dan diganti dengan yang kurang lebih setara. Model kurikulum ini untuk ABK dengan melihat situasi dan kondisinya; d) komisi kurikulum, yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total, sebab tidak memungkinkan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk dapat berfikir setara dengan anak reguler.

Kurikulum khusus untuk sekolah inklusif belum ada maka kurikulum reguler dimodifikasi dengan sangat mendesak untuk

dikembangkan. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang ada dalam kurikulum modifikasi akan menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, serta indikator pencapaian kompetensi dalam penilaian, dengan mempertimbangkan kemampuan individu peserta didik. Hasilnya akan dituangkan dalam *Individualized Educational Program* (IEP) atau Program Pembelajaran Individual (PPI) oleh GPK (Salim, 2010).

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus di SMK Negeri 2 Malang sudah bagus, bisa dikatakan bagus sebab dalam kenyataan pada saat penelitian di dalam kelas peserta didik regular serta peserta didik inklusif terlihat sudah bisa membaur dan sangat akrab. Dengan pelaksanaan pembelajaran yang seperti ini sesuai kejurusannya atau keahliannya, mereka semua bisa saling membantu. Ada juga teman yang regular merasa empati dengan peserta didik berkebutuhan khusus pada saat ada praktik, kemudian membantunya untuk menuntaskan praktikumnya.

Peserta didik ABK yang mengalami pemahaman yang sulit diberikan sistem *pull out*. Dimana saat peserta didik berkebutuhan khusus yang akan menempuh pelajaran Normatif serta Adaptif, peserta didik berkebutuhan khusus harus kembali ke ruangan khusus yang berada di ruang BK dikarenakan mereka akan diberi pemahaman dengan GPK yang di kelas regular beberapa materi pelajaran yang sulit diterima maka dari itu secara khusus mereka akan dibimbing oleh GPK masing-masing kelas.

Pelaksanaan evaluasi peserta didik berkebutuhan khusus di SMK Negeri 2 Malang sudah dan selalu terus menerus dilaksanakan dengan hasil yang selalu bagus dan memuaskan untuk para guru kelas dan GPK. Dalam semua pelaksanaan program pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang selalu bagus dan memuaskan dikarenakan semua dalam pelaksanaannya GPK selalu berkolaborasi dengan guru kelas, maka dari itu semua hasil selalu bisa dirasakan bersama-sama dalam hasil yang bagus dan memuaskan. Guru kelas dan GPK selalu mempunyai kemauan dan

keinginan untuk selalu meningkatkan hasil yang dicapai untuk lebih baik lagi setiap tahunnya serta selalu mempunyai motivasi yang bagus dimana untuk peningkatan pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang kedepannya agar selalu dipercaya oleh masyarakat sekitar dalam sekolah inklusif di Malang yang unggul.

Faktor pendukung serta penghambat selalu ditemui pada saat melakukan sesuatu program yang melibatkan berbagai pihak. Dimana faktor pendukung pada pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang, yaitu dengan adanya dukungan penuh dengan pihak pemerintah, orang tua wali murid, masyarakat sekitar sekolah, serta GPK. Dukungan mereka semuanya sangat menentukan untuk keberlangsungan berjalannya program kebijakan dalam melaksanakan sekolah inklusif di kota Malang.

Prinsip ABK sendiri dinyatakan poin utama adanya pengenalan diri dimana ABK berkembangnya kepercayaan pada diri anak, bisa merasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang dimiliki atau diperoleh masing-masing diri peserta didik ABK. Poin kedua pengoptimalan dalam potensi merupakan pengadaan pendidikan dalam menemukan bakat atau potensi pada masing-masing ABK, bila ABK bisa mengembangkan potensinya peserta didik yang ABK tidak hanya sekedar sukses tetapi juga menjadi inspirasi orang sekitarnya yang sesama ABK maupun peserta didik normal. Poin ketiga adanya latihan kemandirian, dimana peserta didik ABK bisa belajar secara mandiri. Disini peserta didik mencoba menerapkan serta memahami pelajaran yang diperoleh di sekolah kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya.

Pelatihan yang dimana sifatnya berkelanjutan untuk para pengelola pendidikan inklusif salah satu cara yang ditempuh untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif agar didapatkan kesuksesan, dengan perkembangan saat ini yang diperbarui tentang pengelolaan sekolah inklusif diharapkan bisa memperbaiki kinerja para penyelenggara. Untuk kurangnya masalah sarana prasarana pihak sekolah sudah mengirim proposal bantuan kepada pemerintah Pendidikan Khusus Layanan Khusus

(PKLK) untuk membantu penyelenggaraan program pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang tetapi sampai sekarang belum ada respon apapun dari pihak pemerintah, dari pihak swasta pula juga tidak ada tanggapan sama sekali.

Pernyataan di atas bisa diuraikan menjadi beberapa poin yakni (1) fasilitas yang belum memadai mengakibatkan tidak semua kategori ABK bisa diterima di SMK Negeri 2 Malang, (2) adanya tuntutan dari pihak wali murid yang berlebihan atas perkembangan akademis siswa inklusif, sedangkan tidak semua anak mampu memahami dalam hal akademis, serta (3) pelatihan GPK juga harus selalu di adakan dalam upaya peningkatan dan perkembangan dari GPK agar menjadi berkualitas.

Faktor penghambat di SMK Negeri 2 Malang terletak pada sarana prasarana yang kurang memadai. Perlunya ditingkatkan untuk sarana prasarana, selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut pihak sekolah juga menyampaikan bahwasannya selalu berusaha untuk mengirim proposal kepada pemerintah agar cepat bisa memperbaiki sarana prasarana di SMK Negeri 2 Malang. Dengan di atasnya kekurangan dari empat poin yang disampaikan DEPDIKNAS, maka sekolah SMK Negeri 2 Malang berharap sekali dapat menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang sukses dan berkembang. Serta dapat melayani dengan baik ABK dan memperhatikan layanan pendidikan untuk ABK supaya dapat lebih banyak lagi ABK yang diterima di SMK Negeri 2 Malang sebab bisa menampung banyaknya ABK yang ingin sekolah di SMK Negeri 2 Malang.

Penelitian di SMK Negeri 2 Malang kendala dalam hal sarana prasarana yang betul-betul harus diperhatikan pemerintah dan penyelenggara program pendidikan inklusif. Sebenarnya sarana prasarana untuk program pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang ini sudah memadai untuk kebutuhan ABK, tetapi belum sangat maksimal. Sebab di SMK Negeri 2 Malang melihat dari hasil penelitian di lapangan langsung mendapatkan dengan dua ruangan untuk belajar materi normatif dan adaptif yang berdampingan langsung dengan ruang bimbingan konseling.

Sebenarnya sudah cukup ideal untuk langsung membimbing peserta didik inklusif secara terpadu antara kebutuhan pendidikan dan psikologis peserta didik, tetapi sayangnya kelasnya tidak seperti kelas yang digunakan peserta didik yang regular sangat luas kelasnya (Hasyim, 2013).

Pemerintah seharusnya bisa menanggapi hal seperti ini, tetapi dari pihak pemerintah sendiri tidak bisa. Pihak sekolah juga tidak mengetahui karena sudah dikirim proposal bantuan juga tidak ada balasan ataupun tanggapan apa-apa. Tentunya semuanya harus selalu ditingkatkan, apalagi setelah adanya kebijakan pemerintah yang mengatakan ada kewajiban untuk setiap sekolah mulai tahun 2013-2014 harus menerima peserta didik inklusif. Tentunya semua itu akan meningkatnya jumlah peserta didik inklusif di SMK Negeri 2 Malang, artinya sarana prasarana di SMK Negeri 2 Malang juga selalu ditambah serta ditingkatkan supaya semuanya seimbang antara sarana prasarana yang ada dengan jumlah peserta didik inklusif di SMK Negeri 2 Malang.

Wawancara dengan GPK di SMK Negeri 2 Malang didapatkan kurangnya pendanaan dari pemerintah yang berimbas kepada terganggunya proses administrasi pendidikan pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang. Tidak sama latar pendidikan dari GPK memberikan dampak kepada layanan kepada siswa ABK. Tetapi sekolah SMK Negeri 2 Malang setiap ada kendala yang dihadapi seperti penulis jabarkan diatas, semua pihak sekolah yang bersangkutan selalu mencari solusi dan bisa menangani semua kendala yang dihadapi. Salah satu contohnya yaitu kepala sekolah mengikutsertakan GPK yang masih kurang dalam pemahaman terhadap peserta didik yang ABK untuk mengikuti program pemerintah maupun daerah dalam pelatihan-pelatihan mengenai persoalan ABK.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian serta pembahasan di atas, dapat disimpulkan implementasi pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang:

1. Implementasi pendidikan inklusif SMK Negeri 2 Malang, dalam penerimaan, perencanaan (menyiapkan kurikulum), pelaksanaan kegiatan pembelajaran, evaluasi peserta didik inklusif di SMK Negeri 2 Malang sudah berjalan sesuai dengan buku pedoman teknis penyelenggaraan pendidikan, sebab semuanya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan kolaborasi dengan baik dan sangat kompak antara guru kelas dan GPK.
2. Faktor pendukung internal dan eksternal, adanya kolaborasi dengan pemerintah, orang tua wali murid, masyarakat sekitar sekolah, serta para guru pendamping khusus, serta faktor penghambat internal dan eksternal, minimnya bantuan untuk sarana prasarana dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 2 Malang.
3. Dampak positif dari implementasi pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang, adanya dukungan dari semua pihak diantaranya kepala sekolah, GPK, guru kelas, orang tua wali murid sampai masyarakat sekitar sekolah. Dampak negatif dari implementasi pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang, masih minimnya sarana prasarana di SMK Negeri 2 Malang berdampak kurang berkembangnya dalam pemahaman sekolah dalam memajukan serta meningkatkan kegiatan belajar mengajar untuk peserta didik inklusif di SMK Negeri 2 Malang.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian serta simpulan yang telah dikemukakan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Dinas Pendidikan, sebaiknya segera untuk membantu dan melengkapi sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan inklusif di

SMK Negeri 2 Malang supaya kegiatan belajar mengajar bisa berlangsung dengan maksimal tanpa adanya suatu hambatan.

2. Bagi Kepala Sekolah serta GPK, hendaknya selalu melakukan sosialisasi tentang pendidikan inklusif secara berkelanjutan, sehingga warga SMK Negeri 2 Malang bisa memahami, menerima, dan mengerti akan keberadaan peserta didik inklusif. Serta selalu meningkatkan profesionalisme pelaku pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang dengan cara mengirim pelaku pendidikan inklusif untuk mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan pendidikan inklusif. Dalam memperbaiki dalam hal sarana prasarana agar bisa dalam penerimaan peserta lebih banyak lagi, Kepala Sekolah beserta GPK bisa mencari sponsor melalui CSR (Corporate Social Responsibility), swadana dari orang tua wali murid, dan penggalangan dari dana masyarakat.
3. Bagi guru kelas, hendaknya selalu mengikuti pelatihan dan sosialisasi pendidikan inklusif yang diselenggarakan sehingga mempunyai pengertian dan pemahaman yang banyak tentang pendidikan inklusif serta memperbanyak ide-ide dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas reguler. Sebab bilamana guru kelas kalau sudah memahami betul tentang pendidikan inklusif semuanya akan berjalan dengan lancar dan mudah sekali, tidak ada hambatan dalam menangani peserta didik inklusif.

VI. Rujukan

- Abdullah, N. (2013). Mengenal anak berkebutuhan khusus. *MENGENAL ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS*.
- Alfian. (2013). PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA. *Edu-Bio*.
- Ali, L. U., Suastra, I. W., & Sudiatmika, A. A. I. A. R. (2013). Pengelolaan Pembelajaran IPA Ditinjau dari Hakikat Sains pada SMP di Kabupaten Lombok Timur. *E-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Arlina. (2016). EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSI DI SMK NEGERI 6 PADANG. *TINGKAP, XII, No.1*, 1–11.

- Azizah, N. (2016). KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN KHUSUS DALAM PENDIDIKAN TRANSISI. *Jurnal Pendidikan Khusus*.
- Depdiknas. (2003). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 1–33.
- Depdiknas. (2010). Pemenhuhan Hak Asasi Manusia Atas Pendidikan. *Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah, Jakarta*.
- ESCAP. (2015). *Disability at a Glance 2015: Strengthening Employment Prospects for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific*. United Nation. https://doi.org/10.1787/health_glance-2009-en
- Fuadi, K. (2015). Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta. *HIKMAH Journal of Islamic Studies*.
- Gainan, M. . B. (2013). Pemberdayaan Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Bimbingan Konseling. *Jurnal Pendidikan Luar Biasa*.
- Hasyim, Y. (2013). Pendidikan Inklusif di SMK Negeri 2 Malang. *Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 1, 112–121.
- Hidayat, E. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mutu Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, XXI(1).
- Kejuruan, S. M., Keahlian, P., & Boga, T. (2013). Sekolah Menengah Kejuruan.
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2009). Permendiknas 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. *Permendiknas 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif*.
- Lenawati, L., Djasmi, S., & Suntoro, I. (2015). EVALUASI KOMPETENSI GURU DALAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN. *Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan*.
- Maknun, J. (2006). Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Boarding School Berbasis Keunggulan Lokal, 1–30.
- Mohd Nasir, Z., Ahmad, N., Abdul latiff, A. bakar, Negara, R., Saibon, J. S., Karim, F., ... Azlina, N. (2015). Pendidikan inklusif. *Jurnal Usuluddin*. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.08.007>
- Muhammad, H. (2017). *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (TK, SD, SMP, SMA, SMK)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Mujahidin. (2016). Pemerataan Pendidikan anak Bangsa Pendidikan Kapatalisme Pendidikan. *Pemerataan Pendidikan Anak Bangsa*.
- Murniati, N. A. N., Nuvitalia, D., & Sutardi. (2016). Model Pengelolaan Pembelajaran POMER untuk Mengembangkan Bodily Kinesthetic dan Interpersonal Skill Peserta Didik. *Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika*.
- Norliah Mohd Amin, & Mohd Hanafi Mohd Yasin. (2016). Pelaksanaan program pendidikan inklusif murid berkeperluan khas dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 -2015. In *International Conference on Special Education in Southeast Asia*.
- Nurharjadmo, W., & Negara, J. A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Magister Manajemen*.
- Pendidikan, D. (2010). *PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF (TK, SD, SMP, SMA, SMK)*. Surabaya: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- Pendidikan, M. (2008). Permendiknas No 39 Tahun 2008, 3–5.
- RI, K. S. (2011). Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus.
- Ro'fah, Andayani, M. A. (2010). *Inklusi Pada Pendidikan Tinggi (I)*. Yogyakarta: Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rochyadi, E. (2012). Pengantar Pendidikan Luar Biasa. *File.Upi.Edu*.
- Salim, A. (2010). Pengembangan Model Modifikasi Kurikulum Sekolah Inklusif Berbasis Kebutuhan Individu Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16, 21–34.
- Sukardi. (2011). Peranan bimbingan kejuruan terhadap pembentukan karakter kerja siswa di jurusan mesin smkn 2 wonosari. *Cakrawala Pendidikan*, 167–177.
- Sulistyadi, H. K. (2014). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*.
- Supriyoko, K. (2004). Menilik Hak Anak Mendapat Pendidikan Bermutu Sebagai Bagian Kesejahteraan Rakyat. *Karya Ilmiah Dosen*.
- Tahir, N. (2011). Pendidikan inklusif. *Pendidikan Khas Di Malaysia*.

Taufiqurrahman. (2016). MENGGAGAS PENGELOLAAN PENILAIAN UNTUK PENINGKATAN PEMBELAJARAN. *JPII*.

Widyaiswara, D. (2014). Manajemen Kurikulum. *Pendidikan*.

Yanuvianti, M., Supraptiningsih, E., & Raihana Hamdan, S. (2015). penanganan siswa berkebutuhan khusus. *Prosiding SNaPP*.





LAMPIRAN

LAMPIRAN

Nama	NISN	Kelas	Jenis Ketunaan	Tempat, Tgl. lahir	Nama Ortu
dm	-	xii ap 1	Autis	Malang, 15/6/2000	sn
ase	-	xii ap 2	Autis	Balikpapan, 23/11/1999	agp
bt	79828	xii ap 2	Autis	Malang, 1/9/1999	bs
dr	12901	xii ap 2	Tuna Grahita	Malang, 29/12/1998	ek
fss	-	xii ap 2	Autis	Malang, 21/7/2001	um
in	20902	xii ap 2	Tuna Grahita	Malang, 17/11/1998	ph
maf	-	xii ap 3	Autis	Malang, 23/9/1997	st
rw	89932	xii ap 3	Tuna Grahita	Blitar, 17/2/1998	ew
yw	-	xii ap 3	Low Vision	Malang, 6/6/1999	rh
sckw	-	xii tkj 1	Tuna Rungu Wicara	Malang, 23/11/2000	pi
aaa'a	77097	xi ap 1	Autis	Malang, 11/9/2001	mtc
nah	21284	xi ap 1	Tuna Rungu	Malang, 5/7/2000	ah
dka	78613	xi ap 2	Tuna Grahita	Malang, 24/8/2000	np
jrp	77136	xi ap 2	Adhd	Malang, 10/7/2002	nbp
kfnj	88647	xi ap 2	Tuna Grahita	Malang, 24/1/2001	cnt
kka	40942	xi ap 3	Slow Learner	Malang, 21/10/1999	hy
na	16617	xi ap 3	Tuna Grahita	Yogya, 30/6/2000	bi
irr	55492	xi tkj 2	Tuna Rungu	Karawang, 14/5/2001	hr
rna	96451	xi tkj 2	Tuna Rungu	Tasikmalaya, 8/11/1999	aa
eam	99749	xi tkj 3	Tuna Rungu	Malang, 19/3/2001	mj
raa	49694	xi tkj 3	Tuna Rungu	Kediri, 29/1/2001	sp
zaaa	-	xi tkj 3	Tuna Rungu	Malang, 10/3/2001	wa
akt	-	x ap 2	Tuna Grahita	Malang, 2/5/1999	md
ajd	58166	x ap 2	Tuna Grahita	Malang, 12/7/2002	hn
fp	44833	x ap 2	Tuna Grahita	Malang, 1/12/1999	tv
efdr	86144	x ap 2	Down Syndrome	Malang, 4/1/2003	cwh
rfp	04296	x ap 3	Autis	Malang, 19/10/2001	fk
rsg	73417	x ap 3	Tuna Grahita	Malang, 17/9/2001	as
asq	39779	x ap 3	Tuna Grahita	Malang, 15/6/2003	sp
mij	61857	x ap 3	Tuna Grahita	Bojonegoro, 23/7/2002	mns
ec	66186	x tkj 2	Tuna Rungu	Malang, 24/2/2002	th
amr	55215	x tkj 2	Tuna Rungu	Malang, 18/11/2001	mc
mnb	02891	x tkj 3	Tuna Rungu	Kediri, 6/12/2001	ar

REKAP WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala Sekolah

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana implementasi kebijakan sekolah inklusif yang ada di SMK Negeri 2 Malang?	SMK Negeri 2 Malang telah melaksanakan program pendidikan inklusif sejak tahun 2010 dimana saat itu SMK Negeri 2 Malang ditunjuk langsung oleh Dinas Pendidikan untuk melaksanakan sekolah inklusif yang di SMK.
2	Bagaimana komunikasi pemerintah daerah dalam mensosialisasikan Permendiknas No. 70 tahun 2009 yang kemudian dikuatkan dengan Pergub Jatim No. 06 tahun 2011?	Guru Pendamping Khusus (GPK) di SMK Negeri 2 Malang selalu ikut dan diundang dalam kegiatan sosialisasi maupun peningkatan kapasitas GPK yang diselenggarakan baik oleh Dinas Provinsi Jawa Timur serta Nasional.
3	Bagaimana sikap sekolah terhadap kebijakan sekolah inklusif?	Sekolah berusaha semampunya untuk dapat melaksanakan program pendidikan inklusif sesuai dengan aturan yang berlaku.
4	Apakah sumber daya sekolah yang dimiliki sudah mencukupi dalam penyelenggaraan sekolah inklusif?	Masih ada kekurangan. Namun kami akan meningkatkan baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana agar peserta didik ABK dapat terlayani dengan baik.
5	Bagaimana dukungan masyarakat sekolah dan masyarakat umum terhadap kebijakan sekolah inklusif?	Masyarakat sekolah meliputi guru, TU, serta semua warga sekolah serta warga umum cukup mendukung adanya program

		pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang.
6	Apa kendala sekolah dalam penyelenggaraan sekolah inklusif dan bagaimana sekolah mengatasi hal tersebut?	Sekolah terkendala sarana dan prasarana yang aksesibel untuk peserta didik ABK dan sampai saat ini belum ada bantuan baik dari pemerintah ataupun swasta untuk hal tersebut.
7	Apa faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program sekolah inklusif?	a. Faktor Pendukung: Dukungan seluruh pihak serta orang tua b. Faktor Penghambat: Minimnya bantuan untuk sarana dan prasarana untuk sekolah kami.

Wawancara dengan Guru Pendamping Khusus (GPK)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa kuota dalam satu rombongan belajar?	Minimal satu rombel di isi dengan satu peserta didik ABK. Dengan adanya satu peserta didik ABK di dalam rombel, maka melatih peserta didik reguler untuk perhatian dan membantu peserta didik ABK.
2	Prioritas diberikan kepada peserta didik yang tempat tinggalnya jauh atau terdekat dari SMK Negeri 2 Malang?	Terdekat dan telah siap dengan segi perilaku. Peserta didik ABK terdekat rumah merupakan prioritas, sebab saat ini berlakunya system zonasi. Namun, terkadang kita juga harus memperhatikan bakat dan minat peserta didik ABK serta memperhatikan kemampuan apalagi kesiapan perilakunya

		untuk memilih sekolah kemudian jurusan yang tepat pula.
3	Apabila pendaftar lebih dari yang di perlukan sekolah, maka dalam penetapannya bagaimana?	Peserta didik yang kami terima untuk dapat sekolah di SMK Negeri 2 Malang ini yaitu peserta didik yang mampu kita layani (sesuai kemampuan dan sarana sekolah) serta siswa yang memiliki bakat dan kemampuan sesuai jurusan di sekolah kami.
4	Apakah penerimaan serta didik mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah?	Tentu. Sebab bila kami menerima peserta didik ABK namun kami tidak dapat melayani dengan baik dan maksimal akan merugikan peserta didik dan peserta didik tidak dapat berkembang dengan maksimal.
5	Bagaimana perencanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan SMK Negeri 2 Malang?	Perencanaan kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa.
6	Menggunakan kurikulum apa pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang?	Akomodasi Kurikulum. Dimana kurikulum reguler diadaptasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik ABK.
7	Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan SMK Negeri 2 Malang?	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta didik dengan gangguan kecerdasan system <i>pull out</i>. Yang dimaksud <i>pull out</i> disini yaitu apabila peserta didik tidak mampu, peserta didik belajar secara khusus di ruang sumber. - Peserta didik tanpa gangguan kecerdasan mengikuti kelas reguler full dengan

		pendampingan apabila dibutuhkan.
8	Adakah modifikasi dalam kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 2 Malang?	Iya ada. Modifikasi dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik.
9	Bagaimanakah penilaian hasil kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 2 Malang?	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta didik dengan gangguan kecerdasan: penilaian secara individu sesuai kemampuan (lebih banyak deskriptif). - Peserta didik tanpa gangguan kecerdasan: mengikuti penilaian reguler.
10	Bagaimana evaluasi pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang?	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta didik dengan gangguan kecerdasan: a) tidak wajib ikut UNBK bila tidak mampu; b) soal disusun oleh satuan pendidikan sesuai kemampuan siswa; c) memperoleh ijazah yang sama, hanya saja tidak memperoleh SKHUN. - Peserta didik tanpa gangguan kecerdasan: a) mengikuti UNBK seperti peserta didik reguler; b) soal disubstitusi sesuai dengan ketunaan peserta didik. Contoh: Tunarungu, tidak ada soal listening semua reading di mata pelajaran di bahasa ingris; Low vision, font diperbesar semuanya; Tunanetra, soal menggunakan huruf braile.

Wawancara dengan Guru Kelas

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa kuota dalam satu rombongan belajar?	10 disesuaikan jumlah siswa.
2	Prioritas diberikan kepada peserta didik yang tempat tinggalnya jauh atau terdekat dari SMK Negeri 2 Malang?	Tidak, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
3	Apabila pendaftar lebih dari yang di perlukan sekolah, maka dalam penetapannya bagaimana?	Harus sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan sekolah.
4	Apakah penerimaan serta didik mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah?	Iya, karena disesuaikan juga dengan jumlah GPK yang terbatas.
5	Bagaimana perencanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan SMK Negeri 2 Malang?	Disesuaikan dengan kemampuan peserta didik.
6	Menggunakan kurikulum apa pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang?	Kurikulum Modifikasi.
7	Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan SMK Negeri 2 Malang?	Sudah bagus. Pembelajaran untuk mata pelajaran produktif di kelas dan untuk mata pelajaran normatif-adaptif kadang di kelas kadang juga di ruang sumber belajar.
8	Adakah modifikasi dalam kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 2 Malang?	Ada.
9	Bagaimanakah penilaian hasil kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 2 Malang?	Baik, peserta didik dapat bersosialisasi dengan lingkungan.
10	Bagaimana evaluasi pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang?	Sudah bagus, didampingi oleh GPK yang sudah berpengalaman dibidangnya. Peserta didik ABK juga bisa berbaur dengan teman-teman reguler di kelas masing-masing.

LAMPIRAN FOTO



Gambar 1. Pelaksanaan ujian di kelas khusus dengan pendampingan guru pendamping khusus (GPK).



Gambar 2. Soal ditampilkan pada proyektor dan guru pendamping khusus (GPK) membimbing agar peserta didik berkebutuhan khusus tidak terlalu lama dalam mengerjakan soal ujiannya.



Gambar 3. Suasana pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus yang di kelas regular di jurusan Akomodasi Perhotelan (AP).